



Pelaksanaan Kebijakan Urban Farm (Kampung PEPET) di Kota Tangerang

Muhammad Thoriq Ramadhan¹, Isniyunisafna Diah Delima², Muhammad Ibrahim Rantau³

¹Ilmu Administrasi Negara/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Jalan Maulana Yusuf, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15117

² Ilmu Komunikasi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Jalan Maulana Yusuf, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15117

³ Ilmu Administrasi Negara/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Jalan Maulana Yusuf, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15117

Abstrak

Received: 03 Januari 2024
Revised : 10 Januari 2024
Accepted: 18 Januari 2024

Masyarakat perkotaan dihadapkan dengan persoalan kebutuhan pangan yang tinggi dengan keterbatasan lahan untuk memproduksi pangan yang sangat terbatas. Pemerintah Kota Tangerang melalui program Kampung Pepet mencoba melaksanakan program pertanian/urban farm di tengah perkotaan. Adapun permasalahan yang muncul dalam urban farm yang ada dalam pelaksanaannya yaitu terkait kurangnya ketersediaan fasilitas, serta kurangnya SDM yang kompeten dibidangnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Urban Farm di Kota Tangerang dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Urban farm kampung PEPET masih belum berjalan dengan efektif karena masih terdapat beberapa kendala kurangnya SDM, dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan DISBUDPAR kota Tangerang kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kebijakan, Urban farm

(*) Corresponding Author: 1901010113@students.unis.ac.id

How to Cite: Ramadhan, M. T., Delima, I. D., & Rantau, M. I. (2024). Pelaksanaan Kebijakan Urban Farm (Kampung PEPET) di Kota Tangerang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10525212>.

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi di kota-kota besar salah satunya adalah pesatnya pertumbuhan penduduk akibat banyaknya minat masyarakat desa untuk tinggal di perkotaan, serta urbanisasi dan migrasi, kepadatan penduduk yang tidak terkendali juga menimbulkan berbagai masalah yang tidak dapat dikendalikan. (Tufik, mirna dkk), 2019 dalam (Prayojana et al., 2020).

Salah satu permasalahan yang ada pada daerah perkotaan yaitu kepadatan penduduk Indonesia dibandingkan luas daratan Indonesia yang hanya 1,9 juta km² menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, (Indonesia investments, 2017). Kepadatan penduduk yang terus menerus menyebabkan Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks seperti terbatasnya ruang dan infrastruktur penunjang permukiman perkotaan, banyaknya konflik antar penduduk, wabah penyakit yang menyebar dengan cepat karena rumah penduduk yang berdekatan, polusi yang meningkat, sehingga nantinya dapat mempengaruhi permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat yaitu kemiskinan, (Charolin, 2020). Untuk menekan permasalahan di atas, pemerintah harus meningkatkan

kesejahteraan rakyat dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui negara, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Namun kesejahteraan rakyat melalui negara dapat ditingkatkan dengan terbentuknya masyarakat yang mandiri. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat program pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah, dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan tujuan pembangunan daerahnya sendiri, berdasarkan aspek kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah, (Ashar, 2019).

Kepadatan yang sering terjadi kebanyakan di perkotaan karena faktor urbanisasi yang memberikan pesona atau daya tarik tersendiri bagi kota. Kota Tangerang salah satu kota di Provinsi Banten mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya karena Kota Tangerang merupakan kota yang berjudul Kota Industri hal tersebut membuat kota tangerang memiliki daya tarik masyarakat untuk mencari penghasilan dan akhirnya banyak warga luar Tangerang yang datang ke Kota Tangerang (Purwanto, 2019). Luas wilayah Kota Tangerang yaitu 165,44 Km² atau 1,59 %, jika di dibandingkan dengan kepadatan penduduk kota Tangerang maka tidak adanya keseimbangan antara luas wilayah kota Tangerang dengan kepadatan penduduk kota Tangerang dan hal tersebut tidak akan cukup untuk menampung semua masyarakat kota Tangerang. Daya tarik yang dimiliki kota Tangerang akibat dari urbanisasi membuat kota Tangerang mengalami kepadatan penduduk, arus urbanisasi di kota Tangerang terjadi karena banyaknya pembangunan di pusat-pusat penggerak ekonomi, khususnya di bidang industri, juga karena anggapan umum bahwa sangat mudah karena lengkapnya persediaan lahan yang ada untuk mendapatkan berbagai ruang publik untuk ruang-ruang di kota, seperti jaringan internet, kebutuhan rumah sakit yang memadai, dan tersedianya transportasi umum memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, sehingga urbanisasi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat (Inayah, 2022), maka hal tersebut tentunya menimbulkan beberapa permasalahan yang ada di Kota Tangerang seperti kepadatan pemukiman tempat tinggal masyarakat, keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemukiman perkotaan seperti lingkungan yang tidak tertata (Husnul, 2022).

Atas dasar permasalahan tersebut pemerintah kota Tangerang membuat inovasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut yang bermuara pada peningkatan kualitas lingkungan seperti penataan permukiman. Sesuai dengan keinginan Walikota Tangerang maka pemkot Tangerang membuat inovasi dengan adanya kampung tematik (Mubarok, 2018). Kampung tematik di Kota Tangerang berdiri atas dasar peraturan walikota (perwali) No.11, bd.2019/no.11 Peraturan walikota (perwali) tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana keluhan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. (*Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Keluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.*, 2019).

Kampung tematik Kota Tangerang memperhatikan beberapa aspek yaitu mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh, peningkatan serta perbaikan kondisi lingkungan, peningkatan penghijauan wilayah yang intensif, pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengentasan kemiskinan dan mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat (pemberdayaan). Kampung tematik sendiri memiliki berbagai macam tema sesuai dengan potensi yang dapat

dikembangkan seperti kampung PHBS, kampung wisata, kampung religi, kampung budi daya hewan dan tumbuhan (Mubarak, 2018).

Tujuan pelaksanaan kampung tematik di Kota Tangerang untuk mengoptimalkan seluruh potensi lokal yang ada di Kota Tangerang sehingga kampung tersebut bisa menjadi kampung wisata, mandiri dan berkelanjutan. Kampung tematik sendiri dapat terus berkembang karena ciri khas yang dimiliki daerah tersebut. Pemberdayaan kampung tematik di Kota Tangerang yang memiliki potensi wisata untuk diarahkan menjadi destinasi wisata yaitu sesuai dengan PERWALI Kota Tangerang Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Sekretariat JDIH BPK RI, 2019). Pelaksanaan kampung tematik di Kota Tangerang diawali pada tahun 2017 dan 2018 dengan memberikan sosialisasi di 104 kelurahan, kemudian pada tahun 2019 dilakukan pendampingan yang difasilitasi oleh Bappeda dan OPD terkait. Berdasarkan proposal dan usulan maka pada 2019 terbentuk sebanyak 153 kampung tematik yang tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang dan 23 kampung tematik yang dibentuk oleh OPD, dengan berbagai tema, antara lain budi daya pertanian, perikanan, lingkungan hidup, UKM, dan pemuda. (nursalikhah, 2022).

Salah satu kelurahan yang terdapat di kota Tangerang yaitu kelurahan Cibodasari khususnya di RW 10 memiliki suatu keunikan yaitu terdapat “kampung PEPET (petani dan peternak) Cibodasari”. Kampung PEPET sendiri ini baru di sah kan oleh wakil wali kota Tangerang yaitu Sachrudin pada tanggal 26 juli tahun 2022. Kampung PEPET ini awalnya adalah lahan yang terbengkalai tidak ada yang mengurus kemudian dengan insiatif ketua RW 10 yaitu Ferdinal akhirnya membuat pemanfaatan lahan fasum dengan mengubah lahan tersebut menjadi lebih bermanfaat lagi yaitu dengan membuat sebuah kampung tematik. Kampung PEPET mengutamakan program pertanian dan peternakan, mengingat lahan di kota Tangerang yang semakin menipis untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, pada hasil kajian yang dilakukan pada tahun 2019 terdapat alih fungsi lahan pertanian di kota Tangerang sebanyak 36,69 hektare dari luas baku lahan pertanian pada tahun 2018 seluas 1.113,34 hektare berkurang menjadi 1.076,65 hektare (banten.antaranews.com, 2019). Melihat kondisi lahan pertanian dikota Tangerang yang sangat minim maka penggiat kampung PEPET mengalihkan fungsi lahan tersebut menjadi pertanian yang didalamnya ditanami tanaman – tanaman hias seperti bonsai, aglonema dan lainnya.

Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang merilis jumlah kampung tematik di 693 kampung di kota Tangerang baik yang sudah terbentuk, dirintis, maupun baru untuk dipersiapkan. Kepala Bappeda Kota Tangerang menjelaskan untuk kampung tematik yang sudah terbentuk sebanyak 301 lokasi namun untuk kampung tematik yang dinilai sudah mandiri sebab sudah berkembang baru terdapat 15 kampung tematik yaitu kampung markisa, kampung bekelir, kampung hidroponik, kampung grenpul, kampung tidar, kampung batik, kampung KPK, kampung anggur, kampung ATM, kampung mural, kampung harmonis, kampung hijau dan bersih, kampung talas, kampung rukun dan kampung baca, (Zuraya, 2019).

Salah satu kampung tematik di Kota Tangerang yang masih bekembang yaitu Kampung PEPET, Kampung PEPET merupakan kampung yang terletak di

Kota Tangerang Kecamatan Cibodas Kelurahan Cibodasari RW 10. Kampung PEPET pada awalnya adalah lahan fasum yang tidak memiliki nilai manfaatnya, kemudian ketua RW 10 memanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan sebagai bangunan yang memiliki manfaat bagi warga sekitar, Kampung PEPET awalnya dibuat untuk kegiatan sekitar warga RW 10 yang sudah pensiun supaya memiliki kegiatan, kampung PEPET awal berkembang selama tiga tahun dan Pembangunan awal kampung PEPET ini awalnya di biayai secara swadya setelah cukup mulai berkembang kampung PEPET saat ini berada pada naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR).

Kampung ini baru berkembang di tahun 2022 namun kampung PEPET sudah memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Nomor 556//20-pariwisata//2022 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kampung PEPET (Petani & Peternak) Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas. Regulasi tersebut berdasar pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan SK tersebut dapat dilihat bahwa tujuan adanya kampung PEPET yaitu untuk mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti salah satu programnya yang menarik yaitu urbanfarm yang merupakan suatu konsep perkebunan yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Adapun program peternakan yang memanfaatkan lahan kecil untuk beternak. Dan dari itu ternyata didalamnya masih terdapat permasalahan yang ada yakni kendala terkait sumber daya yaitu kurangnya fasilitas untuk peternakan, tidak adanya anggaran untuk melakukan pemberdayaan, terkait disposisi yaitu di kampung PEPET sudah dibentuk struktur organisasi namun didalamnya tidak ada komitmen antara pembina kampung PEPET yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pengelola kampung PEPET dalam melaksanakan program edukasi tersebut, terakhir terkait kurangnya minat UMKM di kampung PEPET itu mengarah pada komunikasi yang masih kurang dilakukan antara pemerintah kepada masyarakat terkait adanya kampung tematik PEPET.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti mengidentifikasi tidak adanya SDM untuk tenaga pendidikan, kurangnya fasilitas tentang peternakan, kurangnya minat UMKM di kampung PEPET. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan program kampung tematik dengan studi kasus kampung PEPET cibodasari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana metode kualitatif deskriptif mengedapankan data yang dibutuhkan. Menurut Whitney (1960) dalam (Agungnesia, 2022), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam penelitian ini ingin menfasirkan dan menguraikan tentang pelaksanaan kebijakan kampung petani dan peternak (PEPET) di Kelurahan Cibodasari Kota Tangerang maka dari itu peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif.

KAJIAN TEORI

Urban farm menurut Nugraheni,(2013) yaitu bagian daripada adanya serangkaian kegiatan berkebun di tengah perkotaan yang bermanfaat dari segi ekonomi dan kesehatan. Lataran mampu untuk menopang kebutuhan oksigen yang menciri khaskan kehidupan yang mana memiliki lima unsur nilai yaitu nilai praktis,ekonomis,ekologis,estetika.(Ramadhani, 2023) . Dalam melaksanakan kebijakan *urban farm* perlu diperhatikan juga pelaksanaan kebijakan pada suatu kota yang melaksanakan konsep *urban farm* yang salah satunya yaitu Kota Tangerang, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan yang ada pada program kampung tematik yang didalamnya terdapat juga konsep *urban farm* maka perlu diperhatikan yaitu empat hal yang dikemukakan oleh Edward dalam pelaksanaan kebijakannya seperti komunikasi antar pelaksana, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.(Wahyuningsih, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep urban farming yang ada di kampung PEPET merupakan bagaimana cara mengembangkan pertanian dan peternakan meskipun disatu lahan yang sempit seperti di perkotaan. Kalo melihat contohnya yaitu Jepang yang mana mereka bertani dan beternak di gedung. Peternakan bebek dan ayam dikedung. Padi di tanam dikedung mereka buat sawah dikedung, sebenarnya kota Tangerang itu bisa. Tapi karena pemerintah itu komunikasinya tidak ada, sumberdayanya tidak ada disposisinya tidak ada akhirnya program tersebut tidak jalan Bertahan tapi tidak menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan Program Kampung (PEPET) tidak lepas dari adanya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, karena hal tersebut yang dapat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan Kampung PEPET. Dibutuhkannya kerjasama yang dilakukan supaya dapat mewujudkan tujuan dari kampung PEPET ini yaitu untuk menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Tangerang dengan tema kampung tematik yang bercirikan edukasi dan pertanian dan peternakan mini.

Tertulis didalam Surat Keputusan Nomor 556//20-pariwisata//2022 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kampung PEPET (Petani & Peternak) Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang kepada kampung PEPET dengan tujuan mengesahkan berdirinya kampung PEPET sebagai kampung tematik. Didalam SK tersebut tertulis bahwa mengingat PERWAL Kota Tangerang Nomor 137 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang mana salah satu tugas dari DISBUDPAR Kota Tangerang pada pasal 9 ayat (2) yaitu pada bidang pariwisata untuk melakukan pengembangan potensi pariwisata serta melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang kepariwisataan, serta melaksanakan fungsi lain dari pimpinan. Namun uraian tersebut bertolak belakang dengan kejadian yang dilihat secara langsung oleh peneliti yaitu masih kurangnya fasilitas yang didapatkan guna menunjang potensi pariwisata di kampung PEPET seperti fasilitas bioflok, lahan untuk memperluas program pertanian di kampung PEPET, kemudian kurang SDM di kampung PEPET yang berpengaruh dalam melakukan

keberlanjutan pengembangan potensi wisata karena SDM salah satu faktor keberhasilan dari program yang telah dibuat, dilihat dari sisi lain yaitu kurangnya komitmen yang dibuat oleh DISBUDPAR dengan penggiat kampung PEPET ditandai dengan penjelasan yang diberikan oleh ketua kampung PEPET bahwa peran DISBUDPAR dalam kampung PEPET tidak terlalu terlihat karena untuk datang ke kampung PEPET saja hanya jika terdapat *event – event* tertentu.

Berikut hasil dari indikator Teori Pelaksanaan Kebijakan:

1. Komunikasi

Menurut Edward III komunikasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi. Jika dilihat dari Transmisi yang dilakukan dalam pelaksanaan kampung PEPET sudah baik yaitu dengan menyebarkan beberapa brosur, sosial media dan juga terkait penyampaian atau pengiriman informasi antara penggiat kampung PEPET dengan pembina kampung PEPET yaitu dilakukannya pertemuan untuk membahas evaluasi selama tiga bulan sekali. Selanjutnya yaitu adanya kejelasan informasi yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan kampung PEPET di kelurahan Cibodasari sudah cukup baik ditandai dengan adanya kejelasan dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah kemudian melihat adanya respon dari masyarakat menurut peneliti itu sudah menandakan adanya kejelasan komunikasi. Terakhir yaitu dalam konsistensi yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan kampung PEPET di kelurahan di Cibodasari menurut peneliti belum berjalan dengan baik, karena dilihat dari konsistensi yang dilakukan saat rapat evaluasi yang dilakukan selama tiga bulan sekali itu tidak terlaksanakan dengan baik.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang menjadi pendukung dalam keberhasilan didalam suatu pelaksanaan karena sumber daya manusia yang menjadi penggerak dari suatu pelaksanaan maka dari itu dibutuhkan SDM yang mempunyai kemampuan yang sesuai untuk menyeimbangkan situasi yang ada pada implementasi di kebijakan tertentu. Sedangkan menurut Edward III sumber daya dibagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia (Staff atau pegawai) dengan sumber daya non manusia (Finansial dan fasilitas).

Sumber daya manusia yang terdapat di dalam pelaksanaan kampung PEPET di Kelurahan Cibodasari belum mencukupi kualitas serta kuantitas yang dimiliki karena kualitas SDM yang terdapat di kampung PEPET tidak menyesuaikan kemampuan dengan keadaan yang ada di kampung PEPET seperti tidak adanya staff yang memahami terkait cara memelihara hewan ternak sedangkan dari segi kuantitas juga belum terpenuhi karena masih kurangnya tenaga pengajar di kampung PEPET.

Terkait sumber daya keuangan yang terdapat dalam pelaksanaan kampung PEPET menurut hasil penelitian peneliti juga belum bisa dikatakan memadai karena memang sumber keuangan dari kampung PEPET pada saat ini hanya berasal dari swadaya serta hasil sumbangan – sumbangan dari beberapa instansi.

3. Disposisi

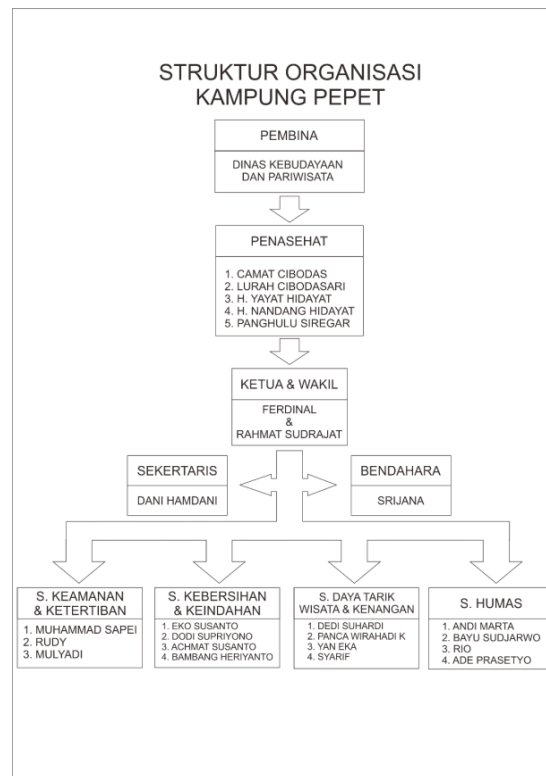
Disposisi yang dimaksud oleh Edward III adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah sikap implementator karena kecenderungan dari sikap perilaku ataupun karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan hasil dari pengamatan oleh beberapa pernyataan beberapa informan yaitu pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap adanya kebijakan terkait adanya program kampung tematik di Kota Tangerang, pelaksana kebijakan juga merespon dengan baik dan memberikan dukungan terhadap adanya kampung PEPET di Kelurahan Cibodasari. Dukungan yang diberikan yaitu berbentuk adanya pengesahan langsung oleh Bapak walikota Tangerang yaitu H. Sachrudin dan juga dibuatkan Surat Keputusan kelompok sadar pariwisata (POKDARIWS) serta pelaksana kebijakan juga mendapat dukungan bantuan dari beberapa instansi berupa fasilitas sarana dan prasarana di kampung PEPET.

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat dari indikator disposisi maka menurut peneliti sikap dari pelaksana kebijakan cukup baik karena dapat merespon adanya salah satu kampung tematik yang ada di Kota Tangerang dengan bentuk berupa pengesahan secara resmi dan juga berupa pendanaan untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana di kampung PEPET.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud oleh Edward III yaitu adanya standar operasi prosedur (SOP) supaya pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan juga sebagai salah satu pedoman atau acuan dalam melaksanakan pelaksanaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung yaitu adanya SOP yang dibuat dalam pelaksanaan kebijakan kampung PEPET yang mana SOP tersebut tercantum pada Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tangerang Nomor :556//20-pariwisata/2022 tentang pengukuhan kelompok sadar wisata (pokdarwis) kampung pepet (petani dan peternak) Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas. Untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan pelaksanaan di kampung PEPET yaitu menjadi salah satu kampung yang menjadi destinasi wisata di Kota Tangerang yang bertemakan edukasi dan wisata. Selain itu juga adanya struktur organisasi didalam kampung PEPET.



Gambar 1. Struktur Birokrasi Kampung PEPET
Sumber: (DISBUDPARKOTATANGERANG, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kampung PEPET Seusai dengan Teori Edward III Tentang Kebijakan Publik di Kelurahan Cibodasari yaitu sebagai berikut: Komunikasi. Adapun tiga indikator didalam komunikasi yaitu: pertama yaitu transmisi. Pelaksanaan penyaluran komunikasi di kampung PEPET sudah cukup baik karena adanya penyaluran komunikasi terhadap pelaksana kebijakan yaitu melalui beberapa platform di media sosial dan juga melalui beberapa brosur yang kemudian di sebarluaskan. Kedua yaitu kejelasan. Dalam pelaksanaan kejelasan sudah cukup baik karena sudah terdapat regulasi yang jelas. Ketiga yaitu konsistensi. Menurut peneliti konsistensi dalam pelaksanaan kampung PEPET belum cukup baik karena ditandai dengan tidak konsistennya melakukan rapat evaluasi yang dilakukan sebanyak tiga bulan sekali. Selanjutnya yaitu sumber daya. Sumber daya dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber daya manusia berupa adanya staff atau pegawai menurut peneliti masih kurang maksimal jika dilihat dari sisi kaulitas dan kuantitasnya. Yang kedua yaitu sumber daya finansial dan juga sarana dan prasarana menurut peneliti juga terpenuhi sepenuhnya karena adanya kekurangan dari fasilitas untuk melakukan peternakan hewan dan perluasan lahan untuk membuat wisata pertanian. Selanjutnya yaitu disposisi bahwa disposisi atau sikap pelaksana dari penerapan kampung PEPET di Kelurahan Cibodasari yaitu sudah cukup baik karena terlihat dari adanya dukungan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan berupa adanya pengesahan secara formal dan juga pemberian

dukungan berupa material. Terakhir yaitu struktur birokrasi bahwa struktur birokrasi pada kampung PEPET sudah baik karena sudah ada SOP yang dapat menjadi acuan atau pedoman serta sudah adanya struktur birokrasi yang berasal dari PERWAL Kota Tangerang Nomor 11 tahun 2019.

Adapun saran yang peneliti ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yaitu Perlu mengadakan seminar rutin terkait pembinaan kampung tematik di Kota Tangerang, perlu membuat sarana pengaduan secara online khusus untuk penggiat kampung tematik di Kota Tangerang, perlu memberikan pemberdayaan secara rutin kepada kampung tematik di Kota Tangerang sebagai bentuk dukungan dari pemerintah sebanyak satu tahun sekali.

Selanjutnya yaitu saran untuk Penggiat Kampung PEPET di Kota Tangerang yaitu perlu mengadakan kerjasama dengan mitra lain seperti akademisi, pelaku usaha atau *volunteer*, mengadakan tarif untuk orang yang berdagang dan berkunjung ke kampung PEPET, memanfaatkan hewan – hewan ternak di kampung PEPET supaya nantinya dapat dijual dan dapat dimasukkan kedalam pemasukan kampung PEPET dan membuat laporan keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agungnesia. (2022). *No Title*. <https://linguistikid.com/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif-mahasiswa-skripsi-wajib-tahu/>
- Ashar. (2019). *FAKTOR PENENTU IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KAMPUNG JAJANAN TRADISIONAL DAN KAMPUNG JAHE KOTA SEMARANG*.
- banten.antaranews.com. (2019). *Alih fungsi lahan pertanian di Banten selama 2018-2019 capai 3,8 ribu hektare*. <https://banten.antaranews.com/berita/59832/alih-fungsi-lahan-pertanian-di-banten-selama-2018-2019-capai-38-ribu-hektare>
- Charolin, O. (2020). *Upaya peningkatan perekonomian keluarga melalui implementasi kampung tematik di kelurahan padang nangka kecamatan singlaran pati kota bengkulu*. 3(2), 385–392.
- DINASKEBUDAYAANDANPARIWISATAKOTATANGERANG. (2022). *SuratkeputusanPOKDARWIS*.
- Husnul. (2022). *pengembangan masyarakat berbasis kampung tematik pada kampung markisa kelurahan pasar baru kecamatan karawaci kota tangerang*.
- Inayah. (2022). *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pemukiman Kumuh Akibat Urbanisasi di Kota Tangerang*. <https://www.pelitabanten.com/opini/perubahan-sosial-budaya-masyarakat-pemukiman-kumuh-akibat-urbanisasi-di-kota-tangerang/>
- Indonesia investments. (2017). *Penduduk Indonesia*. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>
- Mubarok. (2018a). *KAMPUNG TEMATIK KOTA TANGERANG*. <https://prezi.com/gwglnae0zrnl/kampung-tematik-kota-tangerang/#:~:text=Kampung Tematik diharapkan dapat mewujudkan,yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga.>
- Mubarok, A. (2018b). *Kampung Tematik Kota Tangerang*.

- <https://prezi.com/gwglnae0zrnl/kampung-tematik-kota-tangerang/>
NURSALIKAH. (2022). *Kota Tangerang Siapkan Sarana Pendukung Wisata Kampung Tematik*. <https://www.ihram.co.id/berita/rj69qb366/kota-tangerang-siapkan-sarana-pendukung-wisata-kampung-tematik>
- Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Peraturan, D. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*.
- Prayojana, T. W., Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). *DAMPAK URBANISASI TERHADAP PEMUKIMAN*. 13–22.
- Purwanto. (2019). *kota Tangerang: kota seribu industri, seribu jasa*. [https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-tangerang-kota-seribu-industri-sejuta-jasa#:~:text=Kota Tangerang dikenal sebagai “Kota,aktif serta berkembangnya sektor jasa.](https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-tangerang-kota-seribu-industri-sejuta-jasa#:~:text=Kota Tangerang dikenal sebagai%20Kota,aktif serta berkembangnya sektor jasa.)
- Ramadhani. (2023). *2 Pengertian Urban Farming/Pertanian Kota Menurut Para Ahli dan Unsur Nilainya*. <https://www.pinhome.id/blog/urban-farming-pertanian-kota-pengertian-dan-unsur-nilai/>
- Wahyuningsih. (2015). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN STRATEGIK DALAM MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIS SISWA SMK DEWI SARTIKA*.
- Zuraya. (2019). *Kota Tangerang Miliki 693 Kampung Tematik*. <https://www.republika.co.id/berita/pyqkvo383/kota-tangerang-miliki-693-kampung-tematik>